

FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal Penelitian Hukum De Jure memfokuskan pada bidang Hukum, menerima naskah karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang hukum, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain.

FREKUENSI PUBLIKASI

Terbit sebanyak empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

LEMBAGA PENERBIT

Jurnal Penelitian Hukum De Jure diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1410-5632

e-ISSN 2579-8561

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>

INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Indonesian Publication Index (IPI) Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteULike; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); dan MORAREF

KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

ALAMAT KORESPONDENSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021- 2525015
Faksimili 021-2526438
Laman:
www.balitbangham.go.id
Email:
ejournaldejure@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by:



HALAMAN KOSONG

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum

Henry Donald Lbn Toruan, S.H.,M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Pemimpin Redaksi

Ahyar Ari Gayo, S.H.,M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)
Nevey Varida Ariani, SH., M.H, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)
Hardianto Djanggih, S.H, M.H. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai)
Muhaimin, S.H., (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H.,M.Si.
Jaya Laksana, S.E

Sekretariat

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P.
Asmadi, S.H

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom.M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST.,M.Si., (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman
2. Prof. Rianto Adi, M.A.
Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
3. Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.
Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
4. Susi Dwi harijanti, S.H., L.L.M., Ph.D.
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
5. Dr. Hadi Supratikta, M.M.
Hukum Administrasi Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
6. Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M.
Hukum Perusahaan-Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail jurnaldejure@yahoo.com
ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	v
ADVERTORIAL	vii
KUMPULAN ABSTRAK	ix
Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara (<i>Legal Implication of Mining Contract of Works to The State Sovereignty</i>).....	1 - 21
Marulak Pardede	
Kekuasaan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (<i>House of Representatives' Power In Appointing State Officials Under Indonesian Constitutional System</i>).....	23 - 41
Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, dan Lailani Sungkar	
Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (<i>Assessing State's Sovereignty from The Perspective of Immigration Affairs</i>).....	43 - 57
M. Alvi Syahrin	
Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali (<i>Position of Local Wisdom in Spatial Layout of The Province of Bali</i>).....	59 - 71
Muhaimin	
Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia (<i>Pre-Trial Construction by Reconstruction of Commissioner Judge as A Form of Protection of A Suspect's Rights in Indonesian Judiciary System</i>).....	73 - 92
Ulang Mangun Sosiawan	
Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) (<i>The Judge Consideration in Case of Defamation Throughon Social Media (An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM)</i>).....	93 - 102
Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan	
Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (<i>Effectiveness of Services to Prisoners According to The Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedures Law</i>).....	103 - 113
Yuliyanto	

Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia (<i>Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers in Indonesia</i>).....	115 - 126
---	-----------

Nevey Varida Ariani

BIODATA PENULIS	xvii - xviii
------------------------------	---------------------

PEDOMAN PENULISAN.....	xix - xx
-------------------------------	-----------------

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* yang diterbitkan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** bekerjasama dengan **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** bisa kembali menerbitkan Volume 18 Nomor 1 Maret 2018.

Penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di edisi ini memuat 8 (delapan) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil-hasil penelitian/pemikiran ilmiah para peneliti dari berbagai lembaga dan instansi penelitian. Diharapkan dari hasil penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi yang berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.

Pembaca Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang tercinta, menilik persoalan-persoalan hukum yang akan muncul di tahun politik 2018 ini, perlu kita melakukan kilas balik pada tahun 2017 yang lalu. Dimana masih didominasi masalah-masalah hukum seputar korupsi dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kalangan pejabat di lembaga terhormat DPR maupun di lingkungan pemerintahan masih sangat marak terdengar.

Begitupun di awal tahun 2018 ini, persoalan-persoalan hukum cenderung masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya seperti, narkoba, korupsi dan terorisme. Ketiga permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang sistematis mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda.

Apapun persoalan-persoalan hukum yang terjadi saat ini tentunya penegakan hukumnya sangat diharapkan masyarakat dapat lebih merasak rasa keadilan, walaupun akan ditemui banyak tantangan untuk memberlakukannya. Ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan tetap tersimpan dalam hati masyarakat.

Salah satu solusi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum di atas, perlunya ditingkatkan budaya tertib dalam berbahai segi kehidupan dengan mematuhi ketentuan hukum, norma sosial dan lain sehingga akan terwujud suasana aman dan damai, yang akan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18 Nomor 1 Tahun 2018 ini, mengangkat beberapa tulisan terkait dengan persoalan hukum diantaranya Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara, Kekuasaan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia, Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** dan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** yang telah berkenan dalam penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini.

Jakarta, Maret 2018

Redaksi

HALAMAN KOSONG

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Marulak Pardede (Law Research and Development Centre, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Legal Implication Of Mining Contract Of Works To The State Sovereignty

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 1, Page 1 - 21

Minerals are most important natural resources and assets of a country in this modern world, the existence of which is something that cannot be ignored in supporting the economic development and prosperity of the country, and in turn, the total development of the country. Minerals are also assets that count, and Indonesia knows it better. But the facts show that their existences have caused dilemmas, in one side, the mineral resources need to be materialized into actual national assets for the interests and prosperity of the country by exploitation, but on the other side, the utilization has not been optimum, due to the limited domestic finance or limited skilled human resources and adequate high technology. Consequently, it is impossible for the government of the Republic of Indonesia to manage the existing natural resources with its own money, and this has opened huge opportunity for the foreign capital investments. Observing the currently existing contract of works (Kontrak Karya), the basic question is whether or not the contract of works entered into by the central government and mining companies have observed the constitutional mandate of Article 33 of the 1945' Constitution. By using juridical-sociologic approaches; and descriptive type of research; Research Tool of Library Studies, and Document Studies from primary and secondary materials, as well as qualitative data analysis method, it may be concluded that: Contract of Works which are a standardized agreement, must have provided for higher portion of benefits to Indonesia as the owner of the natural resources, due to its higher bargaining position. In fact, however, becoming a party to the Contract of Works does no make the government of the Republic of Indonesia to have as balanced as possible bargaining position. To accommodate the public interests viewed from the side of the contract of cooperation in mining operation, it is necessary to revise the existing contracts by inserting more provisions that legally binding the business-doers and the Government, in particular the ones that relate to the aspects of community development and implementation of corporate social responsibility of the business-doers.

Keywords: Legal Implication of Contract of Works

Mei Susanto, Rahayu Prasetyaningih, and Lailani Sungkar (Faculty of Law, Padjadjaran University)

House of Representatives' Power In Appointing State Officials Under Indonesian Constitutional System

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 1, Page 23 - 41

The power of the Indonesian House of Representatives in appointing State Officials has given a rise to the constitutional issues as the power has extended to include nomination, approval, election, consideration and as the resort for consultation for almost all of the State Officials. The focus of this research is the position of the RI's House of Representatives in the appointment of State Officials under Indonesian Constitutional System and how the House of Representatives interprets the power within the context of people sovereignty and checks and balances theory. This research employs normative legal research method. According to this research one may conclude that the House of Representatives' power in appointing State Officials has a highly significant influence in the Indonesian constitutional system as a manifestation of the people sovereignty within the perspective of democracy and in conformity with the principles of checks and balances. Nevertheless, the extended power of the House of Representatives has made the state officials appointment system bias, and even has given rise to rampant practices of collusion and corruption. The House of Representatives as a political institution brings more and more "politicized" influences in the state officials appointment system. In that case, it is necessary to develop a state official appointment model that involves participative and deliberative representative institutions by means of inviting the public or the people to be involved in the appointment processes of the state officials in order to create a democratic administration and to reduce the political interests of the House of Representatives' power in appointing state officials.

Keywords: House of Representatives, Power, State Officials, Appointment.

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

M. Alvi Syahrin (Polytechnic of Immigration, Human Resources Development Agency of Law and Human Rights)

Assessing State's Sovereignty from The Perspective of Immigration Affairs

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 1, Page 43 - 57

Sovereignty means that a country has full power to exercise its territorial powers within its jurisdiction. The embodiment of the state sovereignty is on the hands of, among others, the Directorate General of Immigration. However, currently the state sovereignty is in worrying conditions. This may be seed from the increased number of refugees and asylum seekers. Not to mention the exodus of foreign workers from China who are now starting to expand to the manpower sector. The problem being investigated in this paper is the prevalence of the Indonesia sovereignty from the perspective of immigration affairs. The research method used in this paper qualitative normative legal research method combined with mixed logical thinking (deductive and inductive). The result of the research finds that the issues of visa-free policies, refugees and asylum seekers affairs as well as the exodus of foreign workers from China have brought significant direct impact to the State Sovereignty of Indonesia. This must have influenced the ideological, political, economic, social, cultural, security and defence orders as well as the state sovereignty itself. This is a serious challenge Indonesia must encounter. The Directorate General of Immigration must act as the spearhead in securing the dignity of the state (*bhumi pura wira wibawa*).

Keywords: State Sovereignty, Immigration, Directorate General of Immigration

Muhaimin (Law Research and Development Center, The Agency for Research and Development of Law and Human Rights)

Position of Local Wisdom in Spatial Layout of The Province of Bali

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 1, Page 59 - 71

Local wisdom is the embodiment of articulated implementation and manifestation as well as the form of traditional knowledge comprehended by the human or people who interact with the surrounding environments. The strength of traditional culture of the Province of Bali, has made Bali, the God Island, one of tourism destinations, both for locals and foreigners, however, it is inevitable that spatial layout becomes more important when all spatial and regional layout plans should accommodate the local wisdom of the Balinese. The special characteristics and uniqueness of the Balinese local wisdom have been proven as special attractions that lure both local and international tourists. The issue of this paper is the position of local wisdom in the spatial layout planning processes of the Province of Bali. The employed method is a combination of normative and empirical-sociological legal research methods, in addition, data are collected directly from the fields by observing the processes and indications related to the position of local wisdom in spatial layout planning processes by the Province of Bali. In order to strengthen the position of local wisdom in spatial layout planning processes of the Province of Bali, the government is required to provide more encouragement by observing the ideas of the public elements such as traditional elders, religious figures and environment observers in order to accommodate the local wisdom as public assets of the Province of Bali by means of involvement of the traditional locals and public figures in focus group discussions.

Keywords: Position of local wisdom, Spatial Layout, Bali

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ulang Mangun Sosiawan (A researcher of Law Research and Development Centre, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Pre-Trial Construction by Reconstruction of Commissioner Judge As A Form Of Protection Of A Suspect's Rights In Indonesian Judiciary System

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 1, Page 73 - 92

The basic idea of the amendment to the Law No. 8 of 1981 is to introduce Commissioner Judges as an effort to protect the human rights of the suspect, both during the investigation and prosecution processes. Human rights protection for the suspect/defendant is an obligation that must be provided to them by the state to prevent any forms of torture. Men are created with equal dignity and positions, since they were born, these most perfect God creatures have been gifted with the basic rights to live their human lives without necessarily be distinguished by race, nationality, age or gender. One can say that pre-trial is a more repressive form of supervision rather than preventive. Limited powers during the pre-trial and also passive nature of the pre-trial judges in the Indonesian Criminal Procedural Code all this time have caused some doubts to their power in protecting the rights of the suspect in particular from the repressive acts of the law enforcers. A Commissioner Judge will have powers during the preliminary examination to watch the application of any coercive means (dwang middelen), to act executively in leading and participating the application of such coercive means, to determine which investigator who should make the investigation in the case of any dispute between the police and public prosecutor, and to pass decision on any objections filed by the parties against whom the coercive means are applied. How the suspect's rights are protected under the criminal judiciary system in Indonesia and how to anticipate the possibility of fabricated case against a suspect, defendant or convict by the investigator are covered. The method used in this paper is normative legal research method. When a sub-system of the Criminal Judiciary System criminally abuses its powers, the similar coercive means applied against the suspect, defendant or convict may also be applied against the law enforcers. The Government of the Republik Indonesia must immediately ratify some rules of the international conventions in particular those that relate to the rights of the suspect, defendant and the convict.

Keywords: Pre-trial, Judge Reconstruction, Judiciary System

Hardianto Djanggih and Nasrun Hipan (Faculty of Law, University of Tompotika Luwuk; Faculty of Law, University of Muhammadiyah Luwuk Banggai)

The Judge Consideration in Case of Defamation Throughon Social Media (An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM)

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 1, Page 93 - 102

Sungguminasa District Court through the decision number 324 / Pid.2014 / PN.SGM has punished the Defendant (FR) for having been proven to conduct offense defamation through social media with imprisonment for 8 (Eight) months. The problem that arises is how the judges judge judgment of criminal liability to defendants who have been proven to conduct defamation cases through social media. This research uses normative juridical research type. The problem approach used in this research includes statute approach, conceptual approach and case approach. The result of the research shows that the judges' consideration number 324 / Pid.2014 / PN.SGM The Sungguminasa District Court has reflected the verdict which has reflected the sense of justice. Where the judges' ruling is able to extract judicial and juridical considerations, so that the judge in his decision finds the defendant's element of error against Article 27 paragraph (1) of the ITE Law that the prosecutor suspects. The judge's verdict on this case that the judge was able to explore the values that live in the community in this case Adat Bugis-Makassar as Adat who became the philosophy of life in place of criminal events.

Keywords: Judge Considerations, Defamation, Social Media

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Yuliyanto (Law Research and Development Center, The Agency for Research and Development of Law and Human Rights)

Effectiveness of Services to Prisoners According to The Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedures Law

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 1, Page 103 - 113

During a detainment, there of course should be services that must be provided by the law enforcers to the prisoners, whether they are Police, Public Prosecutor, Corruption Eradication Commission, Judges and Wardens. Services provided to the prisoners should have referred to the applicable laws and regulations. This research is aimed to depict the provision of services to prisoners according to the Law No. 8 of 1981 from which one can assess the effectiveness of the services to prisoners as well as the problems when delivering the services to prisoners. The type of this research is descriptive research as it is aimed to provide depiction on the conditions of the convicts in jails, with judicial-empirical approaches. Result of the research recommends the followings: (1) the Director General of Correction and the Director General of Laws and Regulations are to immediately prepare and complete the draft of Government Regulation related to the services to prisoners; (2) Law enforcers (Public Prosecutor, police, judges/court officers, and Prison/Correctional Institution officers) need to improve their coordination in performing duties related to the provision of services to prisoners; and (3) the Finance Ministry should make a regulation / circular latter related to the budgetary amounts for food provisions to the prisoners, and inform the same to the Police, KPK, and the state correctional institutions/prisons, in order to prevent any difference of the amount from one institution to another; and (4) the Director General of Correction should improve coordination with the relevant authorities / third parties within the framework of improving the skill/competencies of the Prison/Correctional Institution officers in providing the services to prisoners, and to maximize the cooperation with the relevant authorities / third parties within the scope of providing legal services.

Keywords: Effectiveness, Services, Prisoners.

Nevey Varida Ariani (Law Research and Development Center, The Agency for Research and Development of Law and Human Rights)

Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers in Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 1, Page 115 - 126

Only foreigners who bring benefits and not jeopardizing the security and public order who will be allowed to enter and reside in the territory of the Republic of Indonesia, by means of business expansion which in turn will bring positive impacts to the creation and expansion of job opportunities. The subject of this research is: The Law Enforcement against illegal foreign workers in Indonesia from the perspectives of Law and Policies implemented by the Government in enforcing the law against illegal foreign workers in Indonesia. This research uses judicial-empirical method with qualitative data analysis. Law enforcement against illegal foreign workers may take the forms of administrative actions by paying penalty/fine, deportation, revocation of Business License, if the requirements for employing foreign workers are not met the licensing institution may deport the foreign workers back to their countries of origin, as well as prevention and sanctions under criminal law with a threatened imprisonment. It is recommended to revise the regulation of Minister of Manpower and Transmigration on Procedures of Employing Foreign Workers and the issues related to foreign workers should be materials in the amendment to the Manpower Laws No. 13 of 2003 on immigration affairs, the visa- free policies, foreign workers and their families E-data exchanges. Focus should be given to the supervisory duties and function including the business process of TIMPORA to create effective law enforcement in view of diversified cultures of the communities that sometimes make it difficult to oversee the existence/whereabouts of illegal foreign workers.

Keywords: Law Enforcement, Foreign Workers, Illegal

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Marulak Pardede (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)****Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, Maret 2018, Halaman 1 - 21

Pertambangan termasuk kekayaan alam atau sumber daya alam yang terpenting dalam dunia modern, keberadaannya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang perkembangan ekonomi dan kemakmuran semua negara, terlepas di tingkat kemajuan negara. Pertambangan juga merupakan aset yang perlu diperhitungkan, begitupun dengan negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya telah menimbulkan dilema, di satu pihak sumber daya mineral perlu dikembangkan menjadi kekayaan nasional yang nyata bagi kepentingan kesejahteraan yang memadai untuk mengusahakannya, namun dipihak lain pemanfaatannya belum optimal apakah karena keterbatasan modal dalam negeri maupun kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang terampil dan teknologi tinggi. Oleh karena tidak memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan modal sendiri, maka peluang yang masih tersedia dan memiliki peluang besar adalah investasi modal asing. Melihat Kontrak Karya yang ada saat ini, menjadi pertanyaan apakah kontrak karya yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan perusahaan pertambangan telah didasarkan pada amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta alat penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan/library studies, dan studi dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Kontrak karya yang merupakan perjanjian baku, seharusnya memberikan porsi keuntungan yang lebih kepada bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam, karena dimilikinya posisi tawar yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya, dengan menjadi pihak dalam kontrak karya, tidak menjadikan pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar yang seimbang mungkin. Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat yang ditinjau dari sisi kontrak kerjasama di bidang perusahaan pertambangan, diperlukan revisi atas existing contracts dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang secara hukum mengikat pelaku usahadan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek community development dan pelaksanaan tanggung jawab sosial pelaku usaha.

Kata Kunci: Implikasi Hukum Kontrak Karya**Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, dan Lailani Sungkar (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)****Kekuasaan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, Maret 2018, Halaman 23 - 41

Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara menimbulkan permasalahan ketatanegaraan karena meluas mulai dari mengajukan, memberikan persetujuan, memilih, memberikan pertimbangan dan menjadi tempat konsultasi terhadap hampir semua pejabat negara. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kekuasaan DPR RI dalam pengisian pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan bagaimana kedaulatan rakyat dan teori checks and balances dimaknai dalam kekuasaan DPR tersebut? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara memiliki kedudukan penting dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai wujud daulat rakyat dalam perspektif demokrasi serta sesuai dengan prinsip checks and balances. Walau demikian, meluasnya kekuasaan DPR tersebut membuat sistem pengisian pejabat negara bias, bahkan menimbulkan praktik kolusif dan koruptif. DPR sebagai lembaga politik-pun semakin memberikan dampak "politisasi" dalam pengisian pejabat negara. Untuk itu, perlu dikembangkan model pengisian pejabat negara yang melibatkan lembaga perwakilan yang partisipatif dan deliberatif yakni dengan melibatkan publik atau rakyat dalam proses pengisian pejabat negara sehingga akan dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis serta mengurangi dampak politis dari kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara.

Kata Kunci: DPR, Kekuasaan, Pejabat Negara, Pengisian Jabatan

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****M. Alvi Syahrin Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, Maret 2018, Halaman 43 - 57

Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Belum lagi adanya eksodus tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kini mulai mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana keberlakuan eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan kebijakan bebas visa kunjungan, keberadaan pengungsi dan pencari suaka, serta eksodus tenaga kerja asing Tiongkok berdampak langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan negara. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga wibawa pintu gerbang negara (bhumi pura wira wibawa).

Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi**Muhaimin (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)****Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, Maret 2018, Halaman 59 - 71

Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya. Kuatnya kebudayaan adat provinsi Bali, membuat pulau dewata menjadi salah satu tujuan wisata lokal maupun internasional, namun tidak terelakan bahwa penataan ruang menjadi penting ketika segala rencana penataan ruang dan daerah harus mengakomodir kearifan lokal masyarakat Bali. Bahwa ciri Khas dan keunikan yang terdapat dalam kearifan lokal provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang di Provinsi Bali. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode penelitian hukum normatif dan empirik-sosiologis, selain itu dilakukan juga pencarian data secara langsung di lapangan dengan mengamati proses serta gejala yang terjadi terkait kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali. Untuk dapat memperkuat kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang Provinsi Bali diperlukan pembinaan oleh pemerintah yang beranggotakan dari elemen masyarakat seperti ketua adat, tokoh agama dan pemerhati lingkungan yang dengan melalui proses pengamodiran kearifan lokal sebagai aset masyarakat Provinsi Bali dengan cara pelibatan masyarakat adat, tokoh adat melalui FGD.

Kata Kunci: Kedudukan Kearifan Lokal, Penataan Ruang, Bali

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Ulang Mangun Sosiawan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, Maret 2018, Halaman 73 - 92

Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan menambah keberadaan Hakim Komisaris sebagai upaya perlindungan terhadap HAM dari terdakwa, baik dalam proses penyidikan dan penuntutan. Perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada mereka oleh negara dari segala bentuk penindasan. Manusia diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama, sejak lahir makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugerahi seperangkat hak-hak mendasar dalam kehidupan yang asasi dimiliki tanpa melihat perbedaan ras, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin. Dapat dikatakan bahwa pra peradilan merupakan pengawasan yang lebih bersifat represif dan bukan bersifat preventif. Keterbatasan kewenangan Pra peradilan dan juga sifat pasifnya hakim pra peradilan dalam KUHAP selama ini banyak menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya untuk melindungi hak-hak tersangka terutama dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana perlindungan hak tersangka terdakwa dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana mengantisipasi terjadinya rekayasa kasus terhadap tersangka, terdakwa, terpidana oleh petugas yang melakukan pemeriksaan. Metode penulisan dalam karya tulis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Manakala sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana menyalahgunakan wewenang secara kriminal terhadap mereka dapat juga dilakukan upaya paksa yang sama dengan upaya paksa yang telah dilakukan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi beberapa ketentuan konvensi internasional khususnya menyangkut hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana.

Kata Kunci: Peradilan, Rekonstruksi Hakim, Sistem Peradilan

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Hardianto Djanggih and Nasrun Hipan (Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk,;Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai)

Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, Maret 2018, Halaman 93 - 102

Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui putusan nomor 324/Pid.2014/PN.SGM telah menghukum Terdakwa (FR) karena telah terbukti melakukan delik pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim nomor 324/Pid.2014/PN.SGM Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mencerminkan putusan yang telah mencerminkan rasa keadilan. Dimana putusan hakim mampu menggali pertimbangan-perimbangan secara yuridis dan non yuridis, sehingga hakim dalam putusannya menemukan unsur kesalahan terdakwa terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE yang disangkakan penuntut umum. Putusan hakim atas kasus ini bahwa hakim mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini Adat Bugis-Makassar sebagai Adat yang menjadi falsafah hidup di tempat terjadinya peristiwa pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Yuliyanto (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)****Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, Maret 2018, Halaman 103 - 113

Dalam mekanisme penahanan tentu saja terdapat pelayanan tahanan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Suatu pelayanan tahanan sudah seharusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan tahanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sehingga dari implementasi ini dapat dilihat juga efektifitas pelayanan tahanan maupun kendala dalam melakukan pelayanan tahanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi tahanan di rumah tahanan, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian merekomendasikan beberapa hal yaitu: (1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan agar segera membuat dan menyelesaikan draf Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelayanan tahanan; (2) Aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, hakim/petugas pengadilan, dan petugas Rutan/Lapas) perlu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas terkait pelayanan tahanan; dan (3) Kementerian Keuangan agar membuat regulasi/surat edaran terkait dengan besarnya jumlah anggaran untuk pemberian makan para tahanan, baik di Kepolisian, KPK, maupun di Rumah Tahanan Negara, sehingga tidak bervariasi besarnya; dan (4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka pengembangan kompetensi bagi petugas Rutan/ Lapas dalam melaksanakan pelayanan tahanan, serta memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka memberikan bantuan hukum.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Tahanan.**Nevey Varida Ariani (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)****Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, Maret 2018, Halaman 115 - 126

Hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, melalui upaya perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Pokok masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Penegakan Hukum Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia dilihat dari Aspek Hukum dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-empiris dengan analisa data kualitatif. Penegakan terhadap tenaga kerja asing Ilegal dapat dilakukan Tindakan Administratif berupa membayar biaya beban/denda, Deportasi, pencabutan Izin Usaha, Apabila syarat memperkerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dipenuhi maka lembaga perijinan tersebut dapat memulangkan tenaga kerja asing ke Negara asalnya, dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara. Merekomendasikan Revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing terkait TKA dan menjadi materi muatan dalam perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Bidang keimigrasian kebijakan pemberian bebas visa kunjungan, pertukaran E-data TKA beserta keluarganya. Fokus terhadap tugas dan fungsi pengawasan termasuk bisnis proses dari TIMPORA sehingga pelaksanaan di lapangan efektif dalam penegakan hukum mengingat budaya masyarakat yang beragam terkadang sulit untuk mengawasi keberadaan tenaga kerja asing illegal

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Tenaga Kerja Asing, Ilegal